

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2020/Khusus - Awal Menjabat)**

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD
SUB UNIT KERJA : BAGIAN UMUM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LALU GDE BOH
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 712611

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.129.000.000
1. Tanah Seluas 216 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/70 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 257.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 570 m2/200 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 512.000.000		
4. Tanah Seluas 1.634 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 157.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/70 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 153.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	118.850.000
1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 19.850.000		
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
3. MOTOR, HONDA SPM R2 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	120.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	49.315.189
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---



Sub Total	Rp.	1.417.165.189
III. HUTANG	Rp.	60.470.326
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.356.694.863

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **28 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.